

Eksistensi BUMDes Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Dan Penguatan Ekonomi Desa Di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat

Haniah Hanafie¹, Agus Nugraha², Masrul Huda³

^{1,2}Program Studi Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

³Program Studi Akuntansi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

e-mail: haniah.hanafie@uinjkt.ac.id

* corresponding author
Haniah Hanafie

ARTICLE INFO

Article history

Received : 01-10-2021

Revised : 30-06-2022

Accepted : 30-06-2022

Keywords

BUMDes, PAD,
Economic, Strengthening, Susukan

ABSTRACT

The establishment of BUMDes to be required for every Village. However, not all BUMDes are in accordance with Permendes No.4 Tahun 2015 there are still BUMDes that do not have any activities at all. The purpose of this study is to examine more deeply about the Existence of BUMDes in an Effort to Increase Village Original Income (PAD) and Strengthen Village Economy, Susukan District. The concept of Existence, PAD and economic strengthening are used as analytical knives in research. This study used a qualitative approach. Interviews, observations and documentation review were used as data collection techniques. Descriptive analysis technique is used in processing data by using data analysis procedures proposed by McNabb. Research locations in 4 villages: Susukan, Ujunggebang, Wiyong and Tangkil, Susukan District, Cirebon Regency, West Java Province. The results showed that the existence of BUMDes Subdistrict Susukan was not in line with the expectations of the Act Terms of formality, all four villages had established BUMDes, but BUMDes of Jembar Jaya in Ujunggebang Village had just started operating in the field of clean water supply business, but had not provided significant benefits. Meanwhile, for the three villages, the BUMDes are not yet running. Special for Susukan Village, although the BUMDes has not carried out activities, it has been able to increase PAD and strengthen the village economy. This is because the Susukan Village Government is able to drive the economy through markets, parking lots and shops and night markets

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa disingkat BUMDes menjadi perhatian, sejak dikeluarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tujuan mensejahterakan desa (Ibnu Sam Widodo, 2016). Tujuan BUMDes meningkatkan perekonomian Desa, mensejahterakan masyarakat Desa, meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi Desa, mengembangkan kerjasama, menciptakan peluang dan jaringan, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli Desa (JDIH Kemendes, 2018). Untuk mewujudkan tujuan BUMDes, maka diperlukan kehadiran BUMDes di setiap desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan (UU Desa, 2014), karena sebagian besar modal BUMDes, dimiliki Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk kesejahteraan masyarakat Desa (JDIH Kemendes, 2018).

BUMDes diharapkan dapat menjadi motor penggerak roda perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan asli Desa, sehingga dapat memperkuat ekonomi Desa lebih mandiri, mengingat Desa memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, sebagaimana telah diperlihatkan keberhasilan BUMDes di Negara Cina, jika dibandingkan dengan BUMN Cina dalam bidang manufaktur di Pasar Internasional (Xiaolan Fu and V. N. Balasubramanyam, 2003) dan (Garry D. Bruton, dkk., 2000).



Keberhasilan BUMDes dalam mensejahterakan masyarakat di Indonesia, membuahkan hasil, terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. BUMDes Berhasil Mensejahterakan Masyarakat

No	Nama –Nama BUMDes	Prestasi BUMDes
1.	Tirta Mandiri Desa Ponggok, Jawa Tengah	10.36 Milyar, Laba Bersih 6,5 Milyar, usaha minimarket, dan rumah makan tenda.
2.	Multianggaluku Mandiri Desa Kalukubula, Sulawesi Tengah	-35 juta, penjualan beras, gas elpiji, gula dan bawang merah. -10 juta, warung kopi dan kue akses internet.
3.	Desa Cibodas, Jawa Barat	Penyaluran air bersih dengan 3.200 konsumen.
4.	Desa Tirtonirmala Bantul, Jawa Tengah	Bidang usaha simpan pinjam keuntungan 8.7 Milyar.
5.	Karya Jaya Abadi, Desa Amin Jaya, Kabupaten Kotawaringin, Kalteng	- 30 Juta, perbaikan jalan . -180 Juta, usaha paving blok. -170 Juta, jual beli buah Segar.

Sumber: (Yuli, 2017).

Kecamatan Susukan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon dan secara geografis, berdekatan dengan Pasar Tegal Gubuk yang terkenal di Kabupaten Cirebon. Potensi ekonomi Pasar Tegal Gubuk berimbas juga terhadap roda ekonomi Kecamatan Susukan. Dari konteks ini, Kecamatan Susukan menjadi pilihan lokasi penelitian dengan menetapkan empat Desa, yaitu Susukan, Ujunggebang, Wiyong dan Tangkil.

Keempat desa tersebut telah mendirikan BUMDes sejak tahun 2017 dan dari empat desa yang dikaji, terdapat keunikan yang Tim Penulis temukan. Di Desa Susukan, tanpa kehadiran aktifitas BUMDes, ternyata PAD Desa Susukan meningkat, Kepala Desa Ujunggebang sangat mendorong aktifitas BUMDes, tetapi program penyediaan air bersih yang dikelola BUMDes, belum mampu memberi keuntungan yang signifikan. BUMDes Wiyong ditinggalkan pengurusnya, sedangkan BUMDes Tangkil telah menerima suntikan modal awal dari kepala desa, tetapi hingga saat ini, BUMDes Tangkil tidak beroperasi.

Melihat persoalan di atas, mendorong Tim Penulis mengkaji tentang eksistensi BUMDes dalam upaya meningkatkan PAD dan penguatan ekonomi desa dengan menggunakan konsep eksistensi, BUMDes, PAD dan penguatan.

BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Desa melalui penyertaan secara langsung, berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (JDIH Kemendesa, 2018).

BUMDes dapat didirikan Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan (JDIH Kemendesa, 2018), yaitu: 1). Inisiatif Pemerintah Desa atau Masyarakat, 2). Potensi usaha ekonomi, 3). Sumberdaya alam, 4). Sumberdaya manusia yang mampu mengelola, 5). Penyertaan modal Pemerintah Desa. Sedangkan dalam membangun BUMDes, harus memiliki prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel dan sustainable dengan mekanisme member base dan self help. Intinya BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri (Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, 2007).

Jenis usaha BUMDes (JDIH Kemendesa, 2018), yaitu: 1). Bisnis Sosial, 2). Bisnis Uang, 3). Bisnis Penyewaan, 4). Lembaga Perantara, 5). Trading/perdagangan, 6). Usaha Bersama.

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang Desa melalui rekening dan merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran (Serial Pengelolaan Keuangan Desa, tt). Pendapatan Desa terdiri dari PAD, Pendapatan lain-lain dan Transfer (Serial Pengelolaan Keuangan Desa, tt).

Pendapatan Asli Desa (Pamsimas, 2019) terdiri dari: 1). Hasil Usaha (BUMDes dan Tanah Kas Desa), 2). Hasil Aset (Tambatan Perahu, Pasar Desa, tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi), 3). Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong, 4). Dan lain-lain Pendapatan Asli Desa.

Penguatan Ekonomi Desa adalah suatu proses kegiatan dilakukan Pemerintah Desa melalui BUMDes untuk membantu, mengarahkan, mendukung individu atau kelompok masyarakat desa dalam berusaha. Dengan kata lain, proses pengorganisasian melalui BUMDes tersebut, tidak sekedar mendorong kemampuan individu, atau kelompok, melainkan juga mentransformasikan kemampuan usaha tersebut menjadi kekuatan ekonomi rakyat, dan pada gilirannya menjadi kekuatan ekonomi desa.

Penguatan ekonomi Desa, telah diperjelas melalui UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini, memberikan kejelasan arah mengenai: pengelolaan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pengembangan desa, sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan (Misbahul Munir, 2016).

Secara konkrit, penguatan ekonomi desa dapat dilihat dari jumlah perdagangan di desa meningkat, jumlah pedagang di Desa bertambah, jenis hasil produksi masyarakat bervariasi dan bertambah jumlahnya, bermunculan UKM di masyarakat Desa dan Pemerintah Desa memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan sarana perekonomian di Desa.

Untuk mendukung proses penguatan ekonomi desa, pemerintah membantu melalui program dana desa , diambil dari APBN sebesar Rp.700.000-Rp.1 Milyar untuk setiap Desa agar dapat mengembangkan sarana yang seperti : perbaikan jalan, pembuatan jalan baru untuk distribusi perdagangan; perbaikan kios-kios perdagangan di pasar desa dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan kejelasan tentang pendirian BUMdes, khususnya terlihat dalam pasal 87, yang mempersilahkan Desa mendirikan BUMDes untuk dikelola secara kekeluargaan dan gotong royong serta dijalankan di bidang ekonomi dan pelayanan umum. Dengan demikian, tujuan akhir BUMDes sebagai instrumen dan merupakan modal sosial (social capital), diharapkan menjadi prime over (langkah utama) dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut : pertama, bagaimana eksistensi BUMDes di Kecamatan Susukan, kedua, apakah BUMDes Kecamatan Susukan berkembang atau mengalami hambatan dan ketiga, bagaimana kontribusi BUMDes dalam upaya meningkatkan PAD dan penguatan ekonomi desa.

Ketiga pertanyaan ini penting diajukan, agar Tim Penulis dapat memberi masukan yang tepat bagi pengembangan BUMDes Kecamatan Susukan, sehingga tujuan pengkajian dan analisis tentang eksistensi BUMDes Kecamatan Susukan, menelusuri hambatan-hambatan yang dihadapi BUMDes dan menjelaskan kontribusi BUMDes dalam upaya meningkatkan PAD dan penguatan ekonomi desa dapat terjawab.

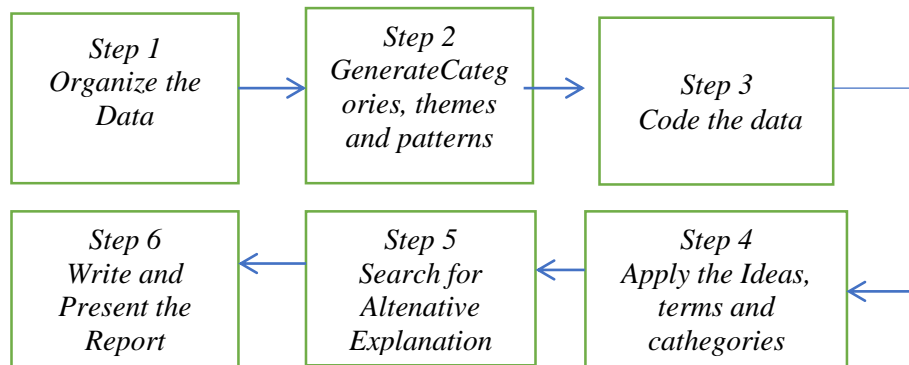
METODE

Lokasi penelitian dilakukan empat Desa: Susukan, Wiyong, Tangkil dan Ujunggebang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pendekatan kualitatif digunakan untuk melihat Eksistensi BUMDes Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan Penguatan Ekonomi Desa di Kecamatan Susukan.

Sumber data berasal dari wawancara menggunakan *In-depth interview* sebanyak 30 orang. Pemilihan *Key Informan* dilakukan dengan Teknik *purposive sampling*, agar lebih *representative*, sehingga informasi yang diperoleh dapat menjawab tujuan penelitian. *Key Informan* terdiri dari Pengurus BUMDes, Perangkat Desa dan Masyarakat. Selain wawancara, observasi dan telaah dokumen terkait dengan BUMDes juga digunakan sebagai sumber data.

Prosedur analisis data (McNabb, 2002) digunakan sebagai dukungan dalam teknik analisis. Berikut alur dan penjelasannya:

Gambar 1: *A.Procedure for Data Analysis*



Sumber: McNabb, 2002: 297

Tahap 1, *Organize the data* (pengorganisasian data), yaitu proses pengumpulan data secara umum baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif tentang pelaksanaan BUMDes di Kecamatan Susukan. Tahap 2, *Generate Categories, themes and patterns* (Penggeneralisasian kategori, tema dan topik penelitian), yaitu tahapan penyederhanaan dan konseptualisasi data dengan melakukan pengelompokkan data hasil penelitian BUMDes di Kecamatan Susukan berdasarkan kategori, tema, dan topik penelitian (fokus penelitian). Tahap 3, *Code the data* (pengkodean data), yaitu tahapan penamaan (pelebelan) fenomena (konseptualisasi data) yang ditemukan tentang struktur, penguatan organisasi dan SDM yang terkait dengan BUMDes. Tahap 4, *Apply the ideas, themes and categories* (Penerapan ide, tema dan kategorisasi) ,yaitu suatu tahapan penerapan ide, tema dan kategori, sehingga tercipta hubungan antar ide, tema dan kategori tersebut dalam merumuskan realitas temuan penelitian. Tahap 5, *Search for alternative explanation* (Pencarian alternatif penjelasan). Tahapan ini dilakukan untuk pencarian alternatif penjelasan terhadap beberapa persoalan yang ditemukan di lapangan. Tahap 6, *Write and present the report* (Menulis dan menyajikan laporan) adalah suatu tahapan yang dilalui di akhir penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi BUMDes di Kecamatan Susukan

BUMDes di Kecamatan Susukan, telah dibentuk sekitar tahun 2017/2018 oleh Pemerintah Kecamatan Susukan yang didasarkan pada UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari lokasi yang diteliti, terdapat 4 BUMDes, yaitu: 1). “Bina Insan Mandiri” di Desa Susukan, 2). “Jembar Jaya” di Desa Ujunggebang, 3). “Rizkimu” di Desa Wiyong dan 4). “Mutiara” di Desa Tangkil. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa hanya BUMDes “Jembar Jaya” dan “Mutiara” yang mempunyai aktifitas. Sedangkan BUMDes “Bina Insan Mandiri” dan “Rizkimu” belum melakukan aktifitas.

BUMDes “Jembar Jaya” mempunyai aktifitas penyaluran air bersih kepada penduduk setempat, tetapi usaha ini belum mampu memperoleh keuntungan yang signifikan. Hal ini dikarenakan banyak warga yang tidak membayar (menunggak pembayaran) iuran. Awalnya BUMDes ini disuntik modal sebesar Rp. 50.000.000 oleh kas desa, tetapi tidak semua modal itu dikelola oleh Pengurus BUMDes. Sebagian dari modal tersebut digunakan untuk membayar hutang operasional pelayanan air bersih sebelum BUMDes dibentuk dan sebagian lagi dipinjam kepala desa, sehingga modal yang diterima BUMdes “Jembar Jaya” hanya Rp. 10.000.000, itupun tidak cukup untuk biaya operasional, sehingga BUMDes sulit mengembangkan usaha di bidang lainnya.

BUMDes “Mutiara”, melakukan kegiatan pembelian dan penjualan gabah. Namun dari hasil wawancara, tampaknya usaha tersebut tidak berjalan lancar, karena pihak aparat pemerintah desa masih terlibat. Modal awal BUMDes “Mutiara” sebesar Rp. 45.000.000 yang berasal dari kas desa dan telah dibelikan gabah, tetapi usaha ini menjadi mandeg. Alasan yang dikemukakan pengurus, atas kemandegan ini adalah alasan klasik: kekurangan modal, sehingga pengurus tidak mampu beraktifas lagi dan berkreasi menciptakan usaha lainnya.

BUMDes “Bina Insan Mandiri” diketuai oleh Surahman, seorang wirausaha dan pernah menjadi pengurus Karang Taruna di Desa Susukan. Sampai penelitian ini dilakukan, BUMDes ini belum melaksanakan kegiatan. Dari hasil wawancara, Surahman mengatakan bahwa ketiadaan kegiatan, karena modal yang dijanjikan sebesar Rp. 50.000.000 oleh Kepala Desa Periode 2014-2019, tidak pernah diberikan. Selain itu, bidang usaha yang selama ini dikelola Pemerintah Desa, tidak diberikan kepada Pengurus BUMDes, misalnya pengelolaan pasar dan parkir. Perlu diketahui, bahwa pemasukan dari pengelolaan pasar dan parkir di Desa Susukan, cukup besar. Oleh karena itu, pihak Pemerintah Desa enggan untuk menyerahkan kepada Pengurus BUMDes. Pengurus pernah ditawarkan untuk mengelola pasar malam di area halaman Kantor Desa, tetapi ditolak oleh Pengurus BUMDes, karena kasihan kepada para pedagang kecil, apabila dipungut iuran dan musim hujan, “penghasilan mereka tidak banyak”, kata Surahman.

BUMDes “Rizkimu didirikan tahun 2017 di Desa Wiyong. BUMDes Rizkimu di ketuai Hj. Marwati, tapi kemudian diganti Agus Eka Sudarso, seorang pedagang kini domisili Jakarta. Dengan demikian, BUMDes Rizkimu tidak berjalan. Selain itu, sebagian pengurus tidak memiliki waktu luang dan punya kepentingan sendiri-sendiri, sehingga BUMDes “Rizkimu” tidak terurus. Dan yang paling fatal, Pemerintah Desa belum mengucurkan modal kerja bagi BUMDes “Rizkimu”. Tampak bahwa perhatian Pemerintah Desa Wiyong terhadap BUMDes sangat kurang, karena fokus perhatian dialihkan pada perbaikan jalan jalan yang masih rusak.

Meskipun demikian, pada tahun 2017-2018, BUMDes “Rizkimu” pernah memfasilitasi kegiatan ‘pembekalan ketrampilan di bidang kuliner’, tetapi setelah pelatihan, belum pernah ditindaklanjuti warga. Persoalan BUMDes di Desa Wiyong, sering dibicarakan dalam musyawarah desa, tetapi pengurus belum siap menentukan kegiatan usaha yang tepat untuk dikelola.

Sebenarnya BUMDes punya keinginan untuk mengadakan Latihan Kerja (BLK) bagi warga masyarakat Desa Wiyong, mengingat banyak warga yang banyak bekerja di Luar Negeri sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia), tetapi menurut Sekdes Desa Wiyong, kegiatan tersebut harus mendapat izin dari pihak pemerintah pusat.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Eksistensi BUMDes di Kecamatan Susukan belum dapat beroperasi sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi BUMDes Kecamatan Susukan.

Hambatan atau Kendala BUMDes

- Ketidakpercayaan pemerintah desa terhadap BUMDes.

Kepercayaan dari kepala desa sebagai pimpinan tertinggi di desa terhadap eksistensi BUMDes harus ada. Apabila BUMDes tidak mendapat kepercayaan Pemerintah Desa, maka BUMDes sulit beroperasi sebagai penggerak ekonomi lokal (Sutoro Eko, dkk, 2015). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa BUMDes Kecamatan Susukan belum berhasil memperlihatkan kinerjanya, disebabkan oleh gaya kepemimpinan kepala desa, karena idealnya, pemimpin yang efektif, mampu menggunakan gaya (*style*) tertentu untuk mengarahkan individu atau kelompok mencapai tujuan (Arifin Tahir, 2014) dan kepemimpinan adalah **pengaruh** (Arifin Tahir, 2014).

- Kekurangan modal

Modal merupakan faktor utama dalam menggerakkan sebuah organisasi, demikian pula bagi BUMDes, sehingga tanpa modal, BUMDes tidak berdaya dan bergerak untuk mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, idealnya ketiadaan modal yang dialami BUMDes “Bina Insan Mandiri” Desa Susukan tidak boleh terjadi, karena sebagaimana dalam UU No. 6 tentang Desa Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tentang Desa Tahun 2014, dikatakan bahwa “modal BUMDes berasal dari kekayaan Desa, melalui penyertaan secara langsung, yang terpisah untuk digunakan mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya dan diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat Desa sebesar besarnya”. Artinya bahwa Aparat Pemerintah Desa Susukan harus mendukung eksistensi BUMDes dengan memberikan modal awal sebagai langkah awal kerja BUMDes Bina Insan Mandiri.

Demikian pula dalam Pasal 135, PP No. 43 tentang Desa Tahun 2014, disebutkan bahwa “modal awal BUMDes bersumber dari APBDes yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUMDes bisa berasal dari Kekayaan Desa atau Penyertaan Modal Masyarakat Desa”. Dengan adanya temuan bahwa ada BUMDes yang tidak memperoleh dukungan modal, maka dapat dikatakan bahwa Aparat Pemerintah Desa telah mengabaikan UU dan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian, melihat eksistensi BUMDes di Kecamatan Susukan, maka sulit memperoleh peningkatan pendapatan asli desa dan penguatan ekonomi desa melalui BUMDes.

- Ketiadaan SDM yang mumpuni dan waktu luang

Meskipun modal menjadi dasar pergerakan BUMDes, tetapi idealnya tidak menjadi hambatan bagi BUMDes yang ingin maju. Artinya, modal dapat diperoleh, dengan berbagai kreatifitas dan waktu luang SDM yang mumpuni. Oleh karena itu, dibutuhkan keseriusan dan waktu luang yang cukup dari SDM BUMDes yang memang benar-benar mau dan berjuang untuk menggerakkan BUMDes, karena salah satu aspek pengukuran kinerja adalah SDM yang berkualitas (Satibi, 2011) dan potensi SDM yang terdapat dalam diri manusia merupakan kekuatan tersendiri yang tidak mungkin diperoleh dari sumber daya lain (Asrudi, 2017).

Selain itu, SDM merupakan suatu kemampuan pada setiap manusia yang ditentukan oleh daya pikir serta daya fisiknya dan menjadi unsur yang sangat penting dalam berbagai kegiatan yang dilakukan, tanpa adanya SDM berkualitas sebuah organisasi tidak berarti apa-apa (M.Hasibuan, 2003).

- Kurangnya dukungan/motivasi dari kepala desa

Kepala desa adalah ujung tombak kepemimpinan di sebuah desa dan kepemimpinan merupakan aspek pengelolaan yang sangat penting dalam sebuah organisasi, termasuk desa. Kemampuan seorang kepala desa untuk memimpin desa, sangat menentukan berhasil atau tidaknya desa tersebut mencapai tujuan yang diinginkan.

Demikian pula dengan BUMDes yang ada di bawah struktur Pemerintah Desa. Dari keempat BUMDes yang terdapat di Kecamatan Susukan, hanya BUMDes “Jembar Jaya” Desa Ujunggebang, yang mendapat dukungan atau motivasi kepala desa. Sedangkan ketiga BUMDes lainnya tidak tampak dukungan yang signifikan dari kepala desa. Keberhasilan BUMDes ditentukan oleh kepemimpinan kepala desa, karena seorang pemimpin merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh dan

berperan penting terhadap kelompok dalam merumuskan ataupun mencapai tujuan (Ryani Dhyan Parashakti dan Dede Irfan Setiawan, 2019).

Kepala desa, apabila diibaratkan Manajer, maka perlu membantu para pekerja meliputi: memahami tugas, memiliki harapan realistis, meningkatkan ketrampilan, meningkatkan usaha yang efektif dan efisien (Arifin Tahir, 2014).

▪ **Kreatifitas pengurus BUMDes rendah**

Dalam Teori Tujuan sebagai Motivasi (Arifin Tahir, 2014), setiap pekerja yang telah memahami dan menerima tujuan organisasi, maka ikut bertanggung jawab dalam mewujudkannya. Artinya tujuan, menjadi motivasi dalam bekerja, sehingga mendorong mereka bekerja dengan cara terbaik, efektif dan efisien, karena prestasi juga merupakan motivasi (Arifin Tahir, 2014), dan mengingat manusia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk berprestasi di atas kemampuan orang lain (Arifin Tahir, 2014).

Intinya, apabila Pengurus BUMDes Kecamatan Susukan mengerti tujuan BUMDes, maka otomatis bertanggungjawab melaksanakan tugasnya dengan baik dan menunjukkan kreatifitasnya. Kreatifitas muncul, harus didahului oleh Inisiatif, hak setiap orang yang harus diberikan oleh pimpinan dalam membuat rencana dan melaksanakannya. Namun realitanya tidak sesederhana itu, karena salah satu factor kunci yang menjadi penghambat terletak kepada kepala desa sebagai pimpinan yang mewadahi BUMDes di setiap desa belum mampu memanage dengan baik.

Kontribusi BUMDes Terhadap Pendapatan Kas Desa

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dari keempat BUMDes yang terdapat di Kecamatan Susukan, hanya BUMDes Jembar Jaya yang terdapat di Desa Ujunggebang yang beroperasi dan mempunyai kegiatan penyediaan air bersih bagi masyarakat, meskipun belum memberikan pemasukan bagi BUMDes apalagi Kas Desa secara signifikan. Hal ini dikarena iuran masyarakat selalu terlambat dan ditunggak, pihak BUMDes sendiri tidak mampu memaksa masyarakat untuk membayar tepat waktu. Selain itu, biaya perawatan mesin cukup mahal, sehingga optimisme (semangat) Pengurus BUMDes agak kendor.

Dua BUMDes lainnya, Rizkimu Desa Wiyong dan Mutiara Desa Tangkil belum berjalan dan tidak memberi penghasilan bagi Kas Desa. BUMDes Mutiara sempat melakukan jual beli gabah, tapi kemudian mandek, alasannya ketiadaan modal. Sedangkan BUMDes Rizkimu Desa Wiyong belum mengadakan kegiatan dan ditinggal pengurus, karena fokus pada urusan masing-masing.

Berbeda dengan BUMDes Bina Insan Mandiri Desa Susukan, meskipun belum melakukan kegiatan dan tidak berkontribusi dalam penguatan ekonomi desa, tetapi PAD Susukan malah meningkat. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa mampu menggerakkan ekonomi desa melalui pemanfaatan Pasar, lahan parkir, penyewaan kios-kios yang dibangun dan penyewaan lahan untuk pasar malam.

Fenomena BUMDes Desa Susukan memperlihatkan, kepala desa memegang peranan penting sebagai unsur pengaruh, sebagaimana dikatakan Arifin Tahir (2014), kepemimpinan adalah pengaruh. Berikut penghasilan diperoleh Pemerintah Desa Susukan:

- ✓ Penyewaan kios, bale dan los Rp.1.103.400.000 per tahun.
- ✓ Penyewaan halaman untuk Pasar Malam (Malam Rabu), penghasilan rata-rata Rp. 20.000 x 50 pedagang x 4 Minggu = Rp. 4.000.000/bulan.
- ✓ Peminjaman Kredit bagi para petani (kerjasama dengan Bank BRI).
- ✓ Pemasokan pupuk bagi petani oleh "Reksa Dana".
- ✓ Penyewaan lahan untuk parkir Rp. 117juta-120 juta per tahun.

Dari 5 jenis usaha yang dikelola Pemerintah Desa Susukan, BUMDes Bina Insan Mandiri pernah ditawarkan mengelola penyewaan halaman untuk Pasar Malam, tetapi ditolak dengan alasan tidak sampai hati memungut iuran dari para pedagang kecil. Saat penelitian dilakukan, BUMDes Bina Insan

Mandiri Desa Susukan belum mengadakan kegiatan dan belum memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Desa.

Berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan BUMDes yang telah dibentuk tahun 2017 melalui hasil Musyawarah Desa dan dikukuhkan dengan Peraturan Desa, sampai saat ini, belum ada satupun yang berjalan efektif dan memiliki kontribusi terhadap penambahan penerimaan kas desa (PADes) secara signifikan. Bahkan kondisi saat ini, keempat BUMDes Kecamatan Susukan belum mempunyai pengurus yang agresif melakukan pengembangan usaha dan giat mencari laba (*benefit*). Kondisi tersebut terjadi, karena dukungan setengah hati Pemerintah Desa untuk mendorong BUMDes benar-benar maju dan profesional.

Hal ini terbukti dengan belum adanya pemberian modal awal Pemerintah Desa kepada BUMDes Susukan dan Wiyong. Sedangkan Desa Ujunggebang dan Tangkil, BUMDes telah diberi alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dari Dana Desa. Namun anggaran tersebut diperuntukan untuk membayar hutang usaha sebelum BUMDes didirikan, sehingga sisanya hanya Rp.10.000.000 yang digunakan BUMDes sebagai biaya operasional usaha penyaluran air. Sedangkan Modal awal BUMDes Mutiara Desa Tangkil, perkembangannya tidak diketahui .

Dari keseluruhan penjelasan, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa menginginkan BUMDes berjalan dulu secara mandiri dan setelah berhasil, baru diberi bantuan modal dari anggaran Dana Desa. Sedangkan pihak BUMDes sendiri telah mengeluh kekurangan (ketiadaan) modal untuk pengembangan usaha.

Eksistensi BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan Penguatan Ekonomi Desa di Kecamatan Susukan, memiliki potensi sumber daya ekonomi sangat baik. Hal tersebut terlihat dari potensi pertanian yang subur, produktif dan sektor perdagangan yang strategis dan prospektif, karena didukung adanya Pasar Tegal Gubuk Kecamatan Arjuwinangun yang terkenal dan sarana infrastruktur jalan yang bagus.

Sumber daya ekonomi yang potensial tersebut, menjadi modal besar bagi desa-desa tersebut tumbuh menjadi desa yang maju dan mandiri sebagai pilar utama kekuatan ekonomi bangsa. Untuk itu, desa-desa tersebut harus didorong mengoptimalkan sumberdaya ekonomi produktif yang dimiliki, guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan penguatan ekonomi masyarakat.

Kebijakan pemerintah yang strategis untuk meningkatkan PAD dan penguatan ekonomi desa adalah dibentuknya BUMDes, melalui musyawarah masyarakat desa. Hadirnya BUMDes di setiap desa, diharapkan dapat menjadi motor penggerak roda perekonomian desa melalui bisnis perdagangan, pelayanan air bersih (*social service*), keuangan mikro, penyewaan, perantara (*broker*), usaha bersama (*holding*) dan bisnis sebagai kontraktor pembangunan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukan, BUMDes yang telah dibentuk 2017, sampai saat ini belum menjalankan aktifitas usaha secara baik, atau *stagnan*. Kondisi tersebut berdampak pada eksistensi BUMDes dalam meningkatkan PAD dan penguatan Ekonomi Desa.

Keadaan tersebut, sangat memprihatinkan dan tidak sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah yang telah mengalokasikan Dana Desa, yang sebahagian untuk mendukung permodalan BUMDes. Sejatinya, dukungan Dana Desa tersebut, dapat mengembangkan produk unggulan desa dan membuat penyertaan modal BUMDes, sehingga BUMDes mampu menjadi soko guru perekonomian desa. Untuk itu, diperlukan kepiawaian kepala desa dalam mengatur rencana bisnis (*bisnis plan*) BUMDes dengan mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki, demi memajukan perekonomian desa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Dari Keseluruhan uraian, dapat disimpulkan:

- Dari segi eksistensi, BUMDes Kecamatan Susukan telah didirikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Masih ada hambatan dihadapi BUMDes Kecamatan Susukan dalam merealisasikan kegiatannya, antara lain modal, SDM dan kepercayaan kepala desa.
- Belum semua BUMDes Kecamatan Susukan melakukan kegiatan, sehingga belum mampu meningkatkan PAD dan penguatan Ekonomi Desa.

SARAN

- Diperlukan keseriusan Kepala Desa untuk mengefektifkan BUMDes yang telah dibentuk.
- Pembekalan dan peningkatan kemampuan SDM (Pengurus) BUMDes (*empowerman*).
- Memprioritaskan program kerja BUMDes yang berkaitan dengan penguatan ekonomi desa.
- Merealisasikan bantuan modal awal bagi BUMDes.
- Memberi kepercayaan kepada Pengurus BUMDes untuk bekerja.
- Pengawasan perlu dilakukan terhadap BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrudi. 2017. Analisis Pengembangan SDM Dalam Meningkatkan BUMDes di Kabupaten Tanggamus.hal. 3. <https://www.academia.edu/37142747>.
- Agusliansyah, Khairul. 2016. Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan BUMDesdi Desa Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4. No. 4. <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/01>.
- Bagus, Lorens. 1996. Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia. Hal 183-185.
- Bruton, Garry D., Hailin Lan and Yuan Lu. 2000. China's Township and Village Enterprises: Kelon's Competitive Edge, Journal Academyof Management Executive. Vol 14. No.1. p.19.
- Buku Pendapatan Desa. (TT). Serial Pengelolaan Keuangan Desa. Penabtu Alliance.
- Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). 2007. Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. 2014. Peranan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. Journal of Rural and Development Vol. V, No. 1, Februari 2014.
- Eko, Sutoro. 2015. Buku 7 BUMDes Spirit Usaha Kolektif Desa. Kementerian Desa PDPT.
- Fu, Xiaolan Fu and V N Balasubramanyam. 2003. Township and Village Enterprises in China dalam Journal of Development Studies. February. DOI: 10.1080/713869424 · Source: RePEc, p.1.
- Hasibuan, M. 2003. Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivias. Jakarta: Bumi Aksara.
- JDIH Kemendes. 2018. Permendes No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. 14 November 2018. <http://jdih.kemendes.go.id/katalog>. Bab I, pasal 1 ayat 2, p.2 . Bab II pasal 4 ayat 2 p. 3. Bab III pasal 3, 19-24. Hal 6-8.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1997. Jakarta: Balai Pustaka. <https://oldi.lipi.go.id/publik>. Hal. 253.
- Kementerian Desa PDPT. (tt). Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi.

- . 2015. Buku 7 Badan Usaha Milik Desa, Spirit Usaha Kolektif Desa,
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta:UPP STIM YKPN. h. 92.
- McNabb, David E. 2002. Research Methods in Public Administration and Nonprofit Management: Quantitative and Qualitative Approaches. USA: M.E. Sharpe. p. 297.
- Munir. Misbahul. 2016. Penguatan Ekonomi Pedesaan. 24 Oktober 2016. <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/penguatan-ekonomi-pedesaan>.
- Pamsimas. 2019. Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 3 Desember 2019. <http://pamsimas.org/permendagri-no-113-tahun-2014-pengelolaan-keuangan-desa>. Bab IV. Pasal 9.
- Parashakti, Ryani Dhyana Parashakti dan Dede Irfan Setiawan. 2019. Gaya Kepemimpinan dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada Bank BJB Cabang Tangerang. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis. Vol. 10, No.1. Januari 2019. P-ISSN 2089-1989. E-ISSN 2614-1523. DOI: <https://doi.org/10.33059/jseb.v10i1.1125>. <https://ejournalunsam.id/index.php/jseb/article/view/1125/944>. Hal 70.
- Ramadana, Coristya Berlian, Heru Ribawanto dan Suwondo. 2013. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Kasus di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang) dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1 No. 6. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/189>.
- Tahir, Arifin. 2014. Perilaku Organisasi. Yogyakarta: DEEPUBLISH. Hal. 66-101.
- Undang-Undang Desa. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bab X pasal 87 ayat 2. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu>. Hal 49.
- Yuli. 2017 . 5 Contoh Usaha BUMDes Yang Sudah Berhasil Dalam Mensejahterakan Masyarakat. 13 Desember 2017. <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/badan-usaha>.
- Widodo, Ibnu Sam. 2016. BUMDes Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Panorama Hukum, Vol. 1, No. 1. ISSN: 2527-6654. Juni 2016. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/issue/view/174>. Hal 3